

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

MENURUT PENGELUARAN
Kabupaten Lombok Timur
2010-2014



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
MENURUT PENGELUARAN**

2010 - 2014

<https://lomboktimurkab.bps.go.id>

KATALOG DALAM TERBITAN

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR 2010-2014

ISBN	: -
Nomor Publikasi	: 5203.1502
Nomor Katalog	: 93020002.5203
Ukuran Buku	: 18 X 25 cm
Jumlah Halaman	: 57 + V
Naskah	: BPS Kabupaten Lombok Timur
Gambar Kulit	: BPS Kabupaten Lombok Timur
Diterbitkan Oleh	: BPS Kabupaten Lombok Timur
Dicetak Oleh	: " CV MAHARANI "

<https://lomboktimurkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan/*income*). Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir.

Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Selong, September 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Lombok Timur,

ttd

Ir. LALU SUPRATNA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR LAMPIRAN.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. PENGERTIAN PENDAPATAN REGIONAL.....	2
1.2. KEGUNAAN STATISTIK PENDAPATAN REGIONAL.....	3
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	6
2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT	9
2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	12
2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	15
2.5. PERUBAHAN INVENTORI	20
2.6. EKSPOR IMPOR.....	24
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN BERDASARKAN PDRBPENGELUARAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2010-2014..	27
3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB LOMBOK TIMUR MENURUT PENGELUARAN	28
3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA.....	32
3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT	34
3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	35
3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	36
3.6. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI.....	37
3.7. PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI	39
3.8. PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI	40
3.9. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH.....	42
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PDRB adhb Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014	28
Tabel 2. Distribusi PDRB adhb Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014	29
Tabel 3. PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014	30
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014	31
Tabel 5. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010 – 2014	32
Tabel 6. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010—2014 (Persen).....	33
Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010—2014.....	34
Tabel 8. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010—2014	37
Tabel 9. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010—2014.....	38
Tabel 10. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010 – 2014	39
Tabel 11. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010 – 2014	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 PDRB adh Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah).....	48
Lampiran 2 PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah).....	49
Lampiran 3 Distribusi PDRB adh Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014 (Persen)	50
Lampiran 4 Distribusi PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014 (Persen)	51
Lampiran 5 Laju Pertumbuhan PDRB adh Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014 (Persen)	52
Lampiran 6 Laju Pertumbuhan PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014 (Persen)	53
Lampiran 7 Indeks Perkembangan PDRB adh Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014.....	54
Lampiran 8 Indeks Perkembangan PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014	55
Lampiran 9 Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (2010=100), Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014.....	56
Lampiran 10 Laju Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (2010=100), Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014 (Persen)	57

<https://lomboktimurkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

<https://lomboktimurkab.bps.go.id>

1.1. PENGERTIAN PENDAPATAN REGIONAL

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat,

13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2. KEGUNAAN STATISTIK PENDAPATAN REGIONAL

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODE ESTIMASI

DAN SUMBER DATA

<https://lomboktimurkab.bps.go.id>

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi, adalah:

- Makanan dan minuman baik bahan maupun makanan jadi, termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;
- Perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
- Bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;

- Barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, tv, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- Barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- Jasa-jasa, seperti kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dsj.), pendidikan (biaya sekolah, kursus, dsj.), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, dan ongkos pembantu rumah tangga;
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen luar wilayah atau luar negeri termasuk dalam konsumsi rumah tangga dan diperlakukan sebagai impor. Sedangkan pembelian langsung oleh non-residen diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut (UN, 1993).

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya

diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas.

Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK)

2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/ olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

\bar{X} : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos,

reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten/kota mencakup: PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; PK-Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/kota; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/kota; PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten/kota bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)

- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut

$$\text{PK-P adhb} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang \& jasa} + \text{output BI}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten, PK-P Kabupaten adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada diwilayah kabupaten tersebut + pengeluaran pemerintah Provinsi yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.

- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku

atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di "*deflate*" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "*reflate*" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan. Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio pengeluaran output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.

- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;

- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia.
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung.

Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori *adh* berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori *adh* Konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori *adh* Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori *adh* Berlaku dengan *menginflate* perubahan inventori *adh* Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori *adh* Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori *adh* Konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori *adh* Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu

saat untuk periode waktu yang berurutan;

- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kabupaten di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kabupaten dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa

berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (*residu*) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://lomboktimurkab.bps.go.id>

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN
BERDASARKAN
PDRBPENGELUARAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2010-2014

3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB LOMBOK TIMUR MENURUT PENGELUARAN

Pemanfaatan nilai tambah yang timbulkan dari berbagai aktifitas ekonomi dapat dilihat dari PDRB menurut pengeluaran. Pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Lombok Timur menurut pengeluaran adh berlaku sebesar Rp. 12,87 triliun, meningkat sekitar Rp. 1,34 triliun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp. 11,53 triliun. Dalam lima tahun terakhir rata-rata peningkatan PDRB penggunaan Lombok Timur adh berlaku sekitar Rp. 948,12 milyar.

**Tabel 1. PDRB adhb Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2010-2014**

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	7.826.726	8.531.742	9.410.447	10.085.752	10.960.552
Konsumsi LNPRT	242.308	253.538	280.813	322.085	386.708
Konsumsi Pemerintah	1.470.657	1.636.007	1.747.481	1.911.151	2.414.528
PMTB	2.996.418	3.429.175	3.853.784	4.106.762	4.515.912
Perubahan Inventori	109.996	114.787	121.317	126.802	139.234
Ekspor	1.721.094	1.810.877	1.977.445	2.061.344	2.214.550
Impor	5.283.774	5.856.236	6.684.302	7.082.050	7.755.593
Total PDRB	9.083.426	9.919.889	10.706.985	11.531.845	12.875.891

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Lombok Timur digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT dan Pemerintah). Permintaan akhir ketiga institusi tersebut melebihi kemampuan produksi domestik sehingga sebagian penyediaan diperoleh melalui impor baik impor luar negeri dan terutama impor antar daerah. Pada tahun 2014 proporsi masing-masing pengeluaran akhir terhadap PDRB pengeluaran sebesar 85,12 persen (untuk konsumsi Rumah tangga), sekitar 3,00

persen (untuk konsumsi LNPRT) dan 18,75 persen (untuk konsumsi Pemerintah). Selain untuk konsumsi akhir sekitar 36,15 persen dari total PDRB pengeluaran Lombok Timur tahun 2014 digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori, dengan komposisi masing-masing 35,07 persen PMTB dan 1,08 persen perubahan inventori.

Di sisi lain, perdagangan regional dan internasional yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor menunjukkan posisi defisit, dimana nilai impor cenderung lebih tinggi dari nilai ekspor. Share komponen ekspor terhadap PDRB pengeluaran Lombok Timur tahun 2010 - 2014 berkisar antara 17 - 18 persen, sedangkan komposisi impor mencapai 58 - 62 persen. Hal ini sekaligus menjadi gambaran ketergantungan konsumsi akhir yang cukup tinggi terhadap impor.

Tabel 2. Distribusi PDRB adhb Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	86,16	86,01	87,89	87,46	85,12
Konsumsi LNPRT	2,67	2,56	2,62	2,79	3,00
Konsumsi Pemerintah	16,19	16,49	16,32	16,57	18,75
PMTB	32,99	34,57	35,99	35,61	35,07
Perubahan Inventori	1,21	1,16	1,13	1,10	1,08
Ekspor	18,95	18,26	18,47	17,88	17,20
Impor	(58,17)	(59,04)	(62,43)	(61,41)	(60,23)
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sebagai bagian integral dari perekonomian nasional maupun regional, perkembangan perekonomian Lombok Timur tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal (seperti struktur perdagangan global, perubahan teknologi dll) dan faktor internal (perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir, ketersediaan suplay domestik dll). Pada tahun 2010-2014 struktur permintaan akhir Kabupaten Lombok Timur terjadi perubahan namun tidak signifikan. Komponen Pengeluaran Rumah tangga masih memiliki proporsi paling besar dengan kecendrungan menurun selama periode tersebut. Selain pengeluaran konsumsi Rumah tangga komponen Ekspor juga mengalami penurunan share dari 18,95 persen tahun 2010 menjadi 17,20 persen pada tahun 2014. Disisi lainnya share komponen konsumsi pemerintah, PMTB dan impor mengalami peningkatan, sementara share konsumsi LNPRT dan perubahan inventori relative tetap selama periode 2010-2014.

Tabel 3. PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	7.826.726	8.275.863	8.695.528	8.978.671	9.562.925
Konsumsi LNPRT	242.308	249.182	266.016	290.767	321.783
Konsumsi Pemerintah	1.470.657	1.543.573	1.588.127	1.667.789	1.808.251
PMTB	2.996.418	3.123.374	3.346.704	3.446.114	3.551.501
Perubahan Inventori	109.996	109.853	109.978	107.935	34.747
Ekspor	1.721.094	1.737.510	1.810.486	1.781.505	2.075.407
Impor	5.283.774	5.389.699	5.643.302	5.551.058	6.104.677
Total PDRB	9.083.426	9.649.656	10.173.536	10.721.723	11.249.937

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selain atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, diperoleh gambaran tentang perubahan PDRB secara volume (kuantitas) tanpa ada pengaruh perubahan harga utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Jika dinilai menggunakan harga konstan 2010, PDRB pengeluaran Kabupaten Lombok Timur tahun 2010 – 2010 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2010 PDRB pengeluaran Kabupaten Lombok Timur adh konstan sebesar Rp. 9,08 triliun, tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 11,25 triliun. Selama periode 2011-2014 laju pertumbuhan PDRB pengeluaran Kabupaten Lombok Timur adh konstan antara 4,93 - 6,23 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2014. Gambaran laju pertumbuhan PDRB pengeluaran kabupaten Lombok Timur adh konstan 2010 seperti tabel 4.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	(Persen)			
	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi Rumah Tangga	5,74	5,07	3,26	6,51
Konsumsi LNPRT	2,84	6,76	9,30	10,67
Konsumsi Pemerintah	4,96	2,89	5,02	8,42
PMTB	4,24	7,15	2,97	3,06
Perubahan Inventori	(0,13)	0,11	(1,86)	(67,81)
Ekspor	0,95	4,20	(1,60)	16,50
Impor	2,00	4,71	(1,63)	9,97
Total PDRB	6,23	5,43	5,39	4,93

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB Lombok Timur menurut pengeluaran. Hal ini mengindikasikan sebagian besar produk domestik dan impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Melimpahnya penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik disamping kenaikan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga, mengakibatkan konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan) dalam kurun waktu 2010 – 2014.

Tabel 5. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	7.826,73	8.531,74	9.410,45	10.085,75	10.960,55
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	7.826,73	8.275,86	8.695,53	8.978,67	9.562,93
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	86,16	86,01	87,89	87,46	85,12
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Juta Rp</i>)					
a. ADHB	24,12	26,03	28,37	30,16	32,38
b. ADHK 2010	24,12	25,25	26,22	26,85	28,25
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (<i>Juta Rp</i>)					
a. ADHB	7,06	7,61	8,31	8,82	9,50
b. ADHK 2010	7,06	7,38	7,68	7,85	8,29
Pertumbuhan (<i>persen</i>)					
a. Total Konsumsi RT	-	5,74	5,07	3,26	6,51
b. Per-RT	-	4,67	3,83	2,41	5,20
c. Perkapita	-	4,65	4,01	2,26	5,54
Jumlah RT (<i>unit</i>)	324.427	327.746	331.662	334.397	338.548
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	1.109.253	1.120.750	1.132.213	1.143.273	1.153.773

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pengeluaran pada periode tahun 2010 s.d 2014 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 87,89 persen dan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 85,12 persen. Sementara itu adh Konstan 2010, komponen konsumsi rumah tangga mengalami rata-rata mengalami pertumbuhan sekitar 5,14 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 6,51 persen.

Tabel 6. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010—2014 (Persen)

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan, Minuman, dan Rokok	49,19	48,66	47,40	46,39	46,79
Pakaian dan Alas Kaki	3,36	3,30	3,29	3,29	3,36
Perumahan, Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	17,04	16,81	17,47	18,09	18,18
Kesehatan & Pendidikan	9,41	9,48	9,69	9,71	9,97
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	12,85	13,24	13,52	13,76	13,21
Hotel & Restoran	3,43	3,45	3,42	3,47	3,52
Lainnya	4,72	5,07	5,22	5,29	4,96
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

Secara umum struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga di Lombok Timur hampir berimbang antara pengeluaran makanan dan non makanan. Pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya. Pada periode 2010-2014 proporsi pengeluaran untuk makanan berada pada kisaran 49,15 sampai dengan 46,39 persen dengan pola yang semakin mengecil setiap tahun. Konsumsi non makanan

yang paling besar adalah untuk perumahan, perkakas perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga dengan share antara 16-18 persen dari seluruh konsumsi rumah tangga.

3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Pengertian lembaga Non Profit secara umum adalah setiap lembaga nirlaba yang independen dan tidak terpengaruh oleh institusi pemerintah. LNPRT berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga pada tingkat harga dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku). Share konsumsi akhir LNPRT terhadap PDRB pengeluaran Lombok Timur masih kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Pada tahun 2010-2014 proporsi Konsumsi Akhir LNPRT berada pada kisaran 2,56 sampai dengan 3,00 persen. Sedangkan laju pertumbuhan adh Konstan pada periode 2011-2014 sekitar 2,84 sampai dengan 10,67 persen. Laju pertumbuhan LNPRT yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2014, sebagai dampak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010—2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	242,31	253,54	280,81	322,09	386,71
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	242,31	249,18	266,02	290,77	321,78
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,67	2,56	2,62	2,79	3,00
Laju Pertumbuhan (% ADHK)	-	2,84	6,76	9,30	10,67

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Secara absolut, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik adh berlaku maupun adh konstan 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar Rp 1,47 triliun , kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2014 nilainya mencapai Rp. 2,14 triliun. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan antara 2,89 sampai dengan 8,42 persen pada periode 2011-2014. Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan dari 16,19 persen ditahun 2010 hingga mencapai 18,75 persen pada tahun 2014.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1.470,66	1.636,01	1.747,48	1.911,15	2.414,53
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	1.470,66	1.543,57	1.588,13	1.667,79	1.808,25
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	16,19	16,49	16,32	16,57	18,75
Konsumsi Pemerintah					
a. Kolektif (<i>Miliar Rp</i>)	785,44	869,46	918,55	1.007,19	1.237,53
(%)	53,41	53,15	52,56	52,70	51,25
b. Individu (<i>Miliar Rp</i>)	685,21	766,55	828,93	903,96	1.177,00
(%)	46,59	46,85	47,44	47,30	48,75
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	1.470,66	1.636,01	1.747,48	1.911,15	2.414,53
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Kolektif	-	2,84	3,35	3,67	3,38
b. Individu	-	10,50	23,02	0,51	1,88
Total PMTB	-	4,24	7,15	2,97	3,06

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Secara absolut pengeluaran konsumsi pemerintah kategori ini mengalami peningkatan namun proporsinya menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 proporsinya mencapai 54,86 persen terhadap total pengeluaran pemerintah, tahun 2014 turun menjadi 51,25 persen. Sedangkan konsumsi pemerintah kategori individu mengalami peningkatan secara nominal maupun proporsinya terhadap total pengeluaran pemerintah.

3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

PMTB merupakan salah satu komponen PDRB pengeluaran yang mengalami perkembangan signifikan baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Selama periode tahun 2010-2014 komponen PMTB adh konstan mengalami pertumbuhan antara 2,97 sampai 7,15 persen dengan pertumbuhan paling tinggi terjadi tahun 2012. Sejalan dengan adh konstan, komponen PMTB adh berlaku juga mengalami peningkatan rata-rata Rp. 379 milyar setiap tahunnya. Peningkatan yang konsisten tersebut berdampak pada share komponen ini terhadap total PDRB pengeluaran yang mengalami peningkatan sekitar 2 persen dari 32,99 persen pada tahun 2010 menjadi 35,07 persen di tahun 2014. Sub komponen bangunan memiliki proporsi terbesar dalam pembentukan modal PMTB. Pada tahun 2010-2014 Sub komponen bangunan menyumbang 77,01 sampai 81,78 persen terhadap total PMTB. Pertumbuhan di sektor bangunan

meskipun cenderung meningkat tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB lainnya

Tabel 8. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010—2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.996,42	3.429,17	3.853,78	4.106,76	4.515,91
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.996,42	3.123,37	3.346,70	3.446,11	3.551,50
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	32,99	34,57	35,99	35,61	35,07
Struktur PMTB					
a. Bangunan (Miliar Rp)	2.450,52	2.810,07	3.076,48	3.196,89	3.477,66
(%)	81,78	81,95	79,83	77,84	77,01
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	545,90	619,11	777,31	909,88	1.038,25
(%)	18,22	18,05	20,17	22,16	22,99
Total PMTB (Miliar Rp)	2.996,42	3.429,17	3.853,78	4.106,76	4.515,91
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	-	2,84	3,35	3,67	3,38
b. Non Bangunan	-	10,50	23,02	0,51	1,88
Total PMTB	-	4,24	7,15	2,97	3,06

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.6. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif). Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar

daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 9. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010—2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi LNPR					
a. ADHB (Miliar Rp)	110,00	114,79	121,32	126,80	139,23
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	110,00	109,85	109,98	107,94	34,75
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,21	1,16	1,13	1,10	1,08

**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif). Pada Tahun 2010 perubahan inventori pada PDRB pengeluaran sebesar Rp. 110,0 miliar, tahun 2011-2014 perubahan inventori mengalami peningkatan antara Rp. 114,79 miliar sampai Rp. 139,23 miliar. Selama periode 2010-2014 proporsi perubahan inventori terhadap PDRB pengeluaran sekitar 1,08 sampai 2,21 persen.

3.7. PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor adalah pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah, wisatawan asing dan sebagainya. Untuk kabupaten Lombok Timur, transaksi ekspor antar negara umumnya berasal dari wisatawan asing yang berkunjung dan mengkonsumsi barang dan jasa secara langsung (direct purchase) di Kabupaten Lombok Timur.

**Tabel 10. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	18,93	19,71	22,43	25,35	33,04
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	18,93	18,61	19,95	21,38	26,92
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,21	0,20	0,21	0,22	0,26
Struktur Ekspor					
a. Barang (Miliar Rp)	8,55	8,82	9,70	10,63	11,58
(%)	45,17	44,75	43,24	41,91	35,05
b. Jasa (Miliar Rp)	10,38	10,89	12,73	14,73	21,46
(%)	54,83	55,25	56,76	58,09	64,95
Total Ekspor (Miliar Rp)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
(%)					
Pertumbuhan (%)	-	-3,33	4,41	3,55	13,83
a. Barang	-	-0,30	9,38	9,91	34,66
b. Jasa	-	-1,67	7,17	7,16	25,95
Total Ekspor	18,93	19,71	22,43	25,35	33,04

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Komponen ekspor luar negeri PDRB pengeluaran Kabupaten Lombok Timur adh berlaku tahun 2014 sekitar Rp. 33,04 milyar mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 25,35 milyar. Selama periode 2010-2014 share komponen ekspor luar negeri terhadap PDRB pengeluaran Lombok Timur hanya 0,20 sampai 0,26 persen. Share yang relatif kecil disebabkan ekspor luar negeri yang tercatat hanya dari konsumsi langsung oleh wisatawan sedangkan barang-barang komoditas ekspor biasanya di kirim ke Bali atau Jawa (yang memiliki Bandara dan pelabuhan internasional) terhitung sebagai perdagangan antar daerah.

Komposisi komponen ekspor luar negeri cukup berimbang antara barang dan jasa dengan kecendrungan ekspor jasa sedikit lebih besar. Pada tahun 2014 sekitar 64,95 persen ekspor luar negeri adalah ekspor jasa (akomodasi dan transportasi) dan 35,05 persen sisanya berupa barang baik makanan maupun non makanan. Sedangkan pertumbuhan riil komponen ekspor luar negeri periode tahun 2011-2014 selalu positif kecuali tahun 2011 (mengalami pertumbuhan negatif 3,33 persen). Pada tahun 2014 laju pertumbuhan PDRB pengeluaran adh konstan komponen ekspor luar negeri mencapai 13,83 persen. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, peningkatan atau penurunan ekspor luar negeri berkaitan dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok Timur sebagai pelaku direct purchase.

3.8. PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Lombok Timur. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E)

dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Transaksi impor memperlihatkan tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Mengingat Kabupaten Lombok Timur tidak memiliki bandara atau pelabuhan internasional sebagai pintu masuk impor, maka komponen impor luar negeri di Kabupaten Lombok Timur umumnya berasal dari konsumsi langsung (*direct purchase*) residen Lombok Timur (seperti Jemaah haji dan wisatawan) terhadap barang maupun jasa yang dilakukan di luar negeri.

**Tabel 11. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	357,95	334,77	338,40	367,12	399,00
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	357,95	324,31	307,74	323,35	320,19
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	3,94	3,37	3,16	3,18	3,10
Struktur Impor (ADHB)					
a. Barang (<i>Miliar Rp</i>)	280,79	263,97	258,70	271,06	258,72
(%)	78,44	78,85	76,45	73,83	64,84
b. Jasa (<i>Miliar Rp</i>)	77,17	70,80	79,69	96,06	140,28
(%)	21,56	21,15	23,55	26,17	35,16
Total Impor (<i>Miliar Rp</i>)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Barang	-	-9,84	-5,79	2,27	-10,77
b. Jasa	-	-7,79	-2,70	14,75	29,10
Total Impor	-	-9,40	-5,11	5,07	-0,98

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Komponen impor Luar negeri PDRB pengeluaran adh berlaku Kabupaten Lombok Timur tahun 2010 sekitar Rp. 357,95 milyar tahun 2011-2012 komponen ini mengalami penurunan dan nilainya lebih kecil dibandingkan 2010. Tahun 2013-

2014 komponen impor luar negeri kembali mengalami peningkatan mencapai Rp. 399,0 milyar pada tahun 2014. Share komponen impor luar negeri terhadap PDRB pengeluaran Lombok Timur sekitar 3,10 sampai dengan 3,94 persen dengan kecenderungan menurun. Pada periode 2011-2013 laju pertumbuhan komponen impor luar negeri mengalami pertumbuhan negatif kecuali tahun 2013 yang mencatat pertumbuhan sebesar 2,27 persen. Menurut komposisinya, sebagian besar impor luar negeri berbentuk barang (rata-rata sekitar 74,48 persen) sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa.

3.9. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar kabupaten menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (demand) dan penyediaan (supply) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (balancing item) dalam keseimbangan demand dan supply suatu perekonomian.

<https://lomboktimurkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV
PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2010 s.d 2014 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Lombok Timur pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2010 s.d 2014, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro
5. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Lombok Timur terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<https://lomboktimurkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1
PDRB adh Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.826.726	8.531.742	9.410.447	10.085.752	10.960.552
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3.850.324	4.119.773	4.426.914	4.539.349	4.879.997
b. Pakaian dan Alas Kaki	263.312	282.742	309.383	324.991	344.544
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.333.417	1.455.915	1.613.345	1.819.528	2.055.753
d. Kesehatan & Pendidikan	736.558	827.857	943.420	1.007.167	1.057.428
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1.005.657	1.126.216	1.259.450	1.404.229	1.559.321
f. Hotel & Restoran	268.108	289.355	340.302	384.588	423.514
g. Lainnya	369.348,29	429.884,00	517.633,37	605.899,47	639.994,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	242.308	253.538	280.813	322.085	386.708
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.470.657	1.636.007	1.747.481	1.911.151	2.414.528
3.a. Konsumsi Kolektif	785.445	869.460	918.550	1.007.195	1.237.528
3.b. Konsumsi Individu	685.212	766.547	828.931	903.956	1.177.000
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.996.418	3.429.175	3.853.784	4.106.762	4.515.912
4.a. Bangunan	2.450.519	2.810.065	3.076.476	3.196.885	3.477.658
4.b. Non-Bangunan	545.899	619.110	777.308	909.877	1.038.254
5. Perubahan Inventori	109.996	114.787	121.317	126.802	139.234
6. Ekspor Luar Negeri	18.929	19.712	22.426	25.353	33.038
6.a. Barang	8.551	8.822	9.698	10.625	11.578
6.b. Jasa	10.378	10.890	12.728	14.728	21.459
7. Impor Luar Negeri	357.952	334.766	338.398	367.123	398.999
7.a. Barang	280.786	263.970	258.704	271.063	258.723
7.b. Jasa	77.166	70.796	79.694	96.061	140.276
8. Net Ekspor Antar Daerah	(3.223.657)	(3.730.304)	(4.390.885)	(4.678.936)	(5.175.081)
8.a. Ekspor	1.702.165	1.791.166	1.955.019	2.035.991	2.181.513
8.b. Impor	4.925.822	5.521.470	6.345.904	6.714.926	7.356.593
PDRB	9.083.426	9.919.889	10.706.985	11.531.845	12.875.891

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 2
PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.826.726,31	8.275.862,80	8.695.527,89	8.978.671,39	9.562.925,45
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3.850.324,45	4.027.216,21	4.121.283,74	4.165.275,62	4.474.264,69
b. Pakaian dan Alas Kaki	263.312,13	273.153,94	286.010,84	295.578,94	321.497,65
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.333.417,38	1.391.232,83	1.519.239,96	1.624.648,19	1.738.507,43
d. Kesehatan & Pendidikan	736.558,33	784.141,32	842.566,94	871.701,82	953.795,94
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1.005.657,41	1.095.322,83	1.175.501,26	1.235.276,08	1.263.733,94
f. Hotel & Restoran	268.108,32	285.432,86	297.090,17	311.614,63	336.543,27
g. Lainnya	369.348,29	419.362,81	453.834,98	474.576,11	474.582,52
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	242.307,97	249.181,69	266.015,71	290.767,50	321.782,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.470.656,98	1.543.572,83	1.588.126,64	1.667.789,16	1.808.250,99
3.a. Konsumsi Kolektif	785.444,54	834.596,58	855.643,57	900.466,75	926.996,49
3.b. Konsumsi Individu	685.212,44	708.976,25	732.483,07	767.322,41	881.254,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.996.418,38	3.123.373,90	3.346.704,45	3.446.113,50	3.551.501,26
4.a. Bangunan	2.450.518,92	2.520.149,26	2.604.614,79	2.700.265,40	2.791.648,78
4.b. Non-Bangunan	545.899,45	603.224,64	742.089,66	745.848,10	759.852,48
5. Perubahan Inventori	109.996,24	109.852,90	109.978,40	107.935,11	34.746,59
6. Ekspor Luar Negeri	18.929,00	18.613,01	19.948,22	21.375,94	26.923,44
6.a. Barang	8.551,00	8.266,28	8.630,66	8.936,84	10.172,56
6.b. Jasa	10.378,00	10.346,73	11.317,57	12.439,10	16.750,88
7. Impor Luar Negeri	357.952,01	324.309,47	307.737,53	323.354,48	320.192,59
7.a. Barang	280.786,01	253.154,31	238.503,10	243.907,26	217.627,85
7.b. Jasa	77.166,00	71.155,17	69.234,44	79.447,22	102.564,74
8. Net Ekspor Antar Daerah	(3.223.657,03)	(3.346.492,04)	(3.545.027,32)	(3.467.574,75)	(3.736.000,89)
8.a. Ekspor	1.702.164,56	1.718.897,19	1.790.537,54	1.760.128,72	2.048.483,07
8.b. Impor	4.925.821,59	5.065.389,23	5.335.564,86	5.227.703,47	5.784.483,96
PDRB	9.083.425,83	9.649.655,61	10.173.536,47	10.721.723,36	11.249.936,80

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 3
Distribusi PDRB adh Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	86,16	86,01	87,89	87,46	85,12
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	42,39	41,53	41,35	39,36	37,90
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,90	2,85	2,89	2,82	2,68
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	14,68	14,68	15,07	15,78	15,97
d. Kesehatan & Pendidikan	8,11	8,35	8,81	8,73	8,21
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,07	11,35	11,76	12,18	12,11
f. Hotel & Restoran	2,95	2,92	3,18	3,34	3,29
g. Lainnya	4,07	4,33	4,83	5,25	4,97
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,67	2,56	2,62	2,79	3,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,19	16,49	16,32	16,57	18,75
3.a. Konsumsi Kolektif	8,65	8,76	8,58	8,73	9,61
3.b. Konsumsi Individu	7,54	7,73	7,74	7,84	9,14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,99	34,57	35,99	35,61	35,07
4.a. Bangunan	26,98	28,33	28,73	27,72	27,01
4.b. Non-Bangunan	6,01	6,24	7,26	7,89	8,06
5. Perubahan Inventori	1,21	1,16	1,13	1,10	1,08
6. Ekspor Luar Negeri	0,21	0,20	0,21	0,22	0,26
6.a. Barang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6.b. Jasa	0,11	0,11	0,12	0,13	0,17
7. Impor Luar Negeri	3,94	3,37	3,16	3,18	3,10
7.a. Barang	3,09	2,66	2,42	2,35	2,01
7.b. Jasa	0,85	0,71	0,74	0,83	1,09
8. Net Ekspor Antar Daerah	(35,49)	(37,60)	(41,01)	(40,57)	(40,19)
8.a. Ekspor	18,74	18,06	18,26	17,66	16,94
8.b. Impor	54,23	55,66	59,27	58,23	57,13
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 4
Distribusi PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	86,16	85,76	85,47	83,74	85,00
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	42,39	41,73	40,51	38,85	39,77
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,90	2,83	2,81	2,76	2,86
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	14,68	14,42	14,93	15,15	15,45
d. Kesehatan & Pendidikan	8,11	8,13	8,28	8,13	8,48
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,07	11,35	11,55	11,52	11,23
f. Hotel & Restoran	2,95	2,96	2,92	2,91	2,99
g. Lainnya	4,07	4,35	4,46	4,43	4,22
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,67	2,58	2,61	2,71	2,86
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,19	16,00	15,61	15,56	16,07
3.a. Konsumsi Kolektif	8,65	8,65	8,41	8,40	8,24
3.b. Konsumsi Individu	7,54	7,35	7,20	7,16	7,83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,99	32,37	32,90	32,14	31,57
4.a. Bangunan	26,98	26,12	25,60	25,18	24,81
4.b. Non-Bangunan	6,01	6,25	7,29	6,96	6,75
5. Perubahan Inventori	1,21	1,14	1,08	1,01	0,31
6. Ekspor Luar Negeri	0,21	0,19	0,20	0,20	0,24
6.a. Barang	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09
6.b. Jasa	0,11	0,11	0,11	0,12	0,15
7. Impor Luar Negeri	3,94	3,36	3,02	3,02	2,85
7.a. Barang	3,09	2,62	2,34	2,27	1,93
7.b. Jasa	0,85	0,74	0,68	0,74	0,91
8. Net Ekspor Antar Daerah	(35,49)	(34,68)	(34,85)	(32,34)	(33,21)
8.a. Ekspor	18,74	17,81	17,60	16,42	18,21
8.b. Impor	54,23	52,49	52,45	48,76	51,42
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 5
Laju Pertumbuhan PDRB adh Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9,01	10,30	7,18	8,67
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,00	7,46	2,54	7,50
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,38	9,42	5,04	6,02
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,19	10,81	12,78	12,98
d. Kesehatan & Pendidikan	12,40	13,96	6,76	4,99
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,99	11,83	11,50	11,04
f. Hotel & Restoran	7,92	17,61	13,01	10,12
g. Lainnya	16,39	20,41	17,05	5,63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,63	10,76	14,70	20,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,24	6,81	9,37	26,34
3.a. Konsumsi Kolektif	10,70	5,65	9,65	22,87
3.b. Konsumsi Individu	11,87	8,14	9,05	30,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,44	12,38	6,56	9,96
4.a. Bangunan	14,67	9,48	3,91	8,78
4.b. Non-Bangunan	13,41	25,55	17,05	14,11
5. Perubahan Inventori	4,36	5,69	4,52	9,80
6. Ekspor Luar Negeri	4,13	13,77	13,05	30,31
6.a. Barang	3,17	9,93	9,57	8,97
6.b. Jasa	4,93	16,88	15,71	45,71
7. Impor Luar Negeri	(6,48)	1,08	8,49	8,68
7.a. Barang	(5,99)	(2,00)	4,78	(4,55)
7.b. Jasa	(8,26)	12,57	20,54	46,03
8. Net Ekspor Antar Daerah	15,72	17,71	6,56	10,60
8.a. Ekspor	5,23	9,15	4,14	7,15
8.b. Impor	12,09	14,93	5,82	9,56
PDRB	9,21	7,93	7,70	11,66

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 6
Laju Pertumbuhan PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,74	5,07	3,26	6,51
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,59	2,34	1,07	7,42
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,74	4,71	3,35	8,77
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,34	9,20	6,94	7,01
d. Kesehatan & Pendidikan	6,46	7,45	3,46	9,42
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,92	7,32	5,09	2,30
f. Hotel & Restoran	6,46	4,08	4,89	8,00
g. Lainnya	13,54	8,22	4,57	0,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,84	6,76	9,30	10,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,96	2,89	5,02	8,42
3.a. Konsumsi Kolektif	6,26	2,52	5,24	2,95
3.b. Konsumsi Individu	3,47	3,32	4,76	14,85
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,24	7,15	2,97	3,06
4.a. Bangunan	2,84	3,35	3,67	3,38
4.b. Non-Bangunan	10,50	23,02	0,51	1,88
5. Perubahan Inventori	(0,13)	0,11	(1,86)	(67,81)
6. Ekspor Luar Negeri	(1,67)	7,17	7,16	25,95
6.a. Barang	(3,33)	4,41	3,55	13,83
6.b. Jasa	(0,30)	9,38	9,91	34,66
7. Impor Luar Negeri	(9,40)	(5,11)	5,07	(0,98)
7.a. Barang	(9,84)	(5,79)	2,27	(10,77)
7.b. Jasa	(7,79)	(2,70)	14,75	29,10
8. Net Ekspor Antar Daerah	3,81	5,93	(2,18)	7,74
8.a. Ekspor	0,98	4,17	(1,70)	16,38
8.b. Impor	2,83	5,33	(2,02)	10,65
PDRB	6,23	5,43	5,39	4,93

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 7
Indeks Perkembangan PDRB adh Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	100,00	109,01	110,30	107,18	108,67
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	107,00	107,46	102,54	107,50
b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	107,38	109,42	105,04	106,02
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	109,19	110,81	112,78	112,98
d. Kesehatan & Pendidikan	100,00	112,40	113,96	106,76	104,99
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	111,99	111,83	111,50	111,04
f. Hotel & Restoran	100,00	107,92	117,61	113,01	110,12
g. Lainnya	100,00	116,39	120,41	117,05	105,63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	104,63	110,76	114,70	120,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	111,24	106,81	109,37	126,34
3.a. Konsumsi Kolektif	100,00	110,70	105,65	109,65	122,87
3.b. Konsumsi Individu	100,00	111,87	108,14	109,05	130,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00	114,44	112,38	106,56	109,96
4.a. Bangunan	100,00	114,67	109,48	103,91	108,78
4.b. Non-Bangunan	100,00	113,41	125,55	117,05	114,11
5. Perubahan Inventori	100,00	104,36	105,69	104,52	109,80
6. Ekspor Luar Negeri	100,00	104,13	113,77	113,05	130,31
6.a. Barang	100,00	103,17	109,93	109,57	108,97
6.b. Jasa	100,00	104,93	116,88	115,71	145,71
7. Impor Luar Negeri	100,00	93,52	101,08	108,49	108,68
7.a. Barang	100,00	94,01	98,00	104,78	95,45
7.b. Jasa	100,00	91,74	112,57	120,54	146,03
8. Net Ekspor Antar Daerah	100,00	115,72	117,71	106,56	110,60
8.a. Ekspor	100,00	105,23	109,15	104,14	107,15
8.b. Impor	100,00	112,09	114,93	105,82	109,56
PDRB	100,00	109,21	107,93	107,70	111,66

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 8
Indeks Perkembangan PDRB adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	100,00	105,74	105,07	103,26	106,51
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	104,59	102,34	101,07	107,42
b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	103,74	104,71	103,35	108,77
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	104,34	109,20	106,94	107,01
d. Kesehatan & Pendidikan	100,00	106,46	107,45	103,46	109,42
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	108,92	107,32	105,09	102,30
f. Hotel & Restoran	100,00	106,46	104,08	104,89	108,00
g. Lainnya	100,00	113,54	108,22	104,57	100,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	102,84	106,76	109,30	110,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	104,96	102,89	105,02	108,42
3.a. Konsumsi Kolektif	100,00	106,26	102,52	105,24	102,95
3.b. Konsumsi Individu	100,00	103,47	103,32	104,76	114,85
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00	104,24	107,15	102,97	103,06
4.a. Bangunan	100,00	102,84	103,35	103,67	103,38
4.b. Non-Bangunan	100,00	110,50	123,02	100,51	101,88
5. Perubahan Inventori	100,00	99,87	100,11	98,14	32,19
6. Ekspor Luar Negeri	100,00	98,33	107,17	107,16	125,95
6.a. Barang	100,00	96,67	104,41	103,55	113,83
6.b. Jasa	100,00	99,70	109,38	109,91	134,66
7. Impor Luar Negeri	100,00	90,60	94,89	105,07	99,02
7.a. Barang	100,00	90,16	94,21	102,27	89,23
7.b. Jasa	100,00	92,21	97,30	114,75	129,10
8. Net Ekspor Antar Daerah	100,00	103,81	105,93	97,82	107,74
8.a. Ekspor	100,00	100,98	104,17	98,30	116,38
8.b. Impor	100,00	102,83	105,33	97,98	110,65
PDRB	100,00	106,23	105,43	105,39	104,93

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 9
Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (2010=100),
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	100,00	103,09	108,22	112,33	114,62
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	102,30	107,42	108,98	109,07
b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	103,51	108,17	109,95	107,17
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	104,65	106,19	112,00	118,25
d. Kesehatan & Pendidikan	100,00	105,58	111,97	115,54	110,87
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	102,82	107,14	113,68	123,39
f. Hotel & Restoran	100,00	101,37	114,54	123,42	125,84
g. Lainnya	100,00	102,51	114,06	127,67	134,85
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	101,75	105,56	110,77	120,18
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	105,99	110,03	114,59	133,53
3.a. Konsumsi Kolektif	100,00	104,18	107,35	111,85	133,50
3.b. Konsumsi Individu	100,00	108,12	113,17	117,81	133,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00	109,79	115,15	119,17	127,16
4.a. Bangunan	100,00	111,50	118,12	118,39	124,57
4.b. Non-Bangunan	100,00	102,63	104,75	121,99	136,64
5. Perubahan Inventori	100,00	104,49	110,31	117,48	400,71
6. Ekspor Luar Negeri	100,00	105,90	112,42	118,60	122,71
6.a. Barang	100,00	106,72	112,36	118,89	113,82
6.b. Jasa	100,00	105,25	112,47	118,40	128,11
7. Impor Luar Negeri	100,00	103,22	109,96	113,54	124,61
7.a. Barang	100,00	104,27	108,47	111,13	118,88
7.b. Jasa	100,00	99,50	115,11	120,91	136,77
8. Net Ekspor Antar Daerah	100,00	111,47	123,86	134,93	138,52
8.a. Ekspor	100,00	104,20	109,19	115,67	106,49
8.b. Impor	100,00	109,00	118,94	128,45	127,18
PDRB	100,00	102,80	105,24	107,56	114,45

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 10
Laju Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (2010=100),
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2014 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,09	4,98	3,80	2,03
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,30	5,00	1,46	0,08
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,51	4,50	1,64	(2,53)
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,65	1,48	5,46	5,58
d. Kesehatan & Pendidikan	5,58	6,06	3,19	(4,05)
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,82	4,20	6,10	8,54
f. Hotel & Restoran	1,37	12,99	7,75	1,96
g. Lainnya	2,51	11,27	11,94	5,63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,75	3,75	4,93	8,49
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,99	3,82	4,14	16,53
3.a. Konsumsi Kolektif	4,18	3,05	4,19	19,35
3.b. Konsumsi Individu	8,12	4,67	4,10	13,37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,79	4,88	3,49	6,70
4.a. Bangunan	11,50	5,93	0,23	5,22
4.b. Non-Bangunan	2,63	2,06	16,46	12,01
5. Perubahan Inventori	4,49	5,57	6,50	241,09
6. Ekspor Luar Negeri	5,90	6,16	5,50	3,46
6.a. Barang	6,72	5,28	5,81	(4,27)
6.b. Jasa	5,25	6,86	5,28	8,20
7. Impor Luar Negeri	3,22	6,53	3,25	9,76
7.a. Barang	4,27	4,03	2,46	6,97
7.b. Jasa	(0,50)	15,69	5,04	13,11
8. Net Ekspor Antar Daerah	11,47	11,12	8,94	2,66
8.a. Ekspor	4,20	4,78	5,94	(7,94)
8.b. Impor	9,00	9,11	8,00	(0,99)
PDRB	2,80	2,38	2,20	6,41

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara